

BAB II

PROFIL PARTAI POLITIK FRETILIN

Dalam bab ini yang akan dibahas adalah yang menjadi latarbelakang lahirnya Partai Fretilin pada tahun 1975 sampai dengan tahun 1999 setelah Timor Leste mengadakan Referendum pada tanggal 30 Agustus 1999. Program-program yang disampaikan Partai Politik Fretilin dalam kampanye pemilihan nasional untuk Parlemen Nasional periode 2017–2022. Partai-partai politik yang mengikuti pemilihan Parlemen Nasional 2017–2022 dan partai politik yang mendapatkan kursi di Parlemen Nasional.

2.1. Sejarah lahirnya Partai Fretilin



Gambar 1. Bendera Partai Fretilin dan lambang Partai Fretilin

Lahirnya partai politik di Timor Leste akibat dari Revolusi Bunga di Portugal yang terjadi pada bulan April tahun 1974 memberikan kehidupan politik baru masyarakat Timor Leste untuk mendirikan partai politik. Tiga partai politik terbesar adalah Uniao Democratica Timorese (UDT) yang menginginkan kemerdekaan bertahap melalui “otonomi progresif” di bawah Portugal, Frente

Revolucionaria do Timor Leste Independente (FRETILIN) yang menginginkan kemerdekaan segera, dan Associacao Popular Democratica de Timor (Apodeti) yang menghendaki integrasi otonom dengan Republik Indonesia. Belakangan juga muncul partai-partai politik lebih kecil, antara lain Klibur Oan Timor Assuain (KOTA), dan Trabalhista (Partai Buruh). Pada bulan Januari 1975, UDT dan Partai Fretilin membentuk koalisi berdasarkan prinsip kemerdekaan, penolakan integrasi dengan Indonesia, dan pembentukan sebuah pemerintahan transisi yang terdiri dari wakil-wakil kedua partai tersebut. Namun koalisi ini gagal mengatasi berbagai perbedaan yang muncul diantara pendukung masing-masing partai dan kemudian pecah pada bulan Mei 1975. Situasi ini kemudian dengan cepat memburuk, hingga terjadi bentrokan terbuka antara pendukung kedua partai. Keberadaan Partai Fretilin sebagai satu-satunya partai yang Prokemerdekaan merupakan sebuah harapan dan optimisme bagi rakyat Timor Leste. (Durand, 2009: 16).

Perubahan ASDT menjadi Partai Fretilin pada September 1974 dilakukan oleh karena para pemimpin ASDT merasa organisasi yang lama terlalu sempit dan kurang berkembang untuk mencapai tujuannya. Menurut mereka, agar bisa mencapai kemerdekaan, orang Timor Leste harus bersatu dan untuk mempersatukan mereka maka yang diperlukan adalah suatu “frente” (front) bukan partai politik. Dalam front inilah dihimpun semua orang Timor Leste yang menginginkan Negerinya berdiri sebagai negara yang merdeka, tanpa memandang ras, agama, keturunan, and bahkan ideologi politik mereka. Perubahan ASDT

menjadi Partai Fretilin juga menandai semakin jelasnya pengertian gerakan ini mengenai bagaimana mencapai kemerdekaan. (Hill, 2000: 70)

FRETILIN merupakan kependekan dari *Frente Revolucionária de Timor-Leste Independente* yang dalam Bahasa Indonesia adalah sebuah gerakan pertahanan yang berjuang untuk kemerdekaan Timor Leste. Partai Fretilin, Sebelumnya dikenal sebagai *Associação Social Democrática Timorese* (ASDT) yang didirikan pada tanggal 20 Mei 1974 (kamus besar bahasa Indonesia)



Gambar 2. Presiden Pertama Pada saat Partai Fretilin memproklamasikan kemerdekaan pada sepihak tanggal 28 November 1975

Sejak itu Nama FRETILIN mulai dipakai. Pola gerakannya lebih bergeser ke paham Marxisme. Partai Fretilin menolak prinsip Perjuangan UDT maupun Apodeti, dan tetap berpegang pada prinsipnya sendiri yakni kemerdekaan penuh

bagi Timor Leste tanpa bergantung pada suatu negara manapun. Fretilin memproklamasikan deklarasi kemerdekaan sepihak pada tanggal 28 November 1975, dan yang menjadi Presiden Republik Demokrasi Timor Leste pertama adalah Fransisko Xavier do Amaral dan beberapa Menteri lainnya. Partai politik, UDT, Apodeti, KOTA, dan Trabalhista memproklamasikan keinginan mereka untuk mengintegrasikan Timor Leste ke dalam Indonesia, ini dikenal dengan Deklarasi Balibo. Portugal tidak mengakui kedua deklarasi tersebut karena masih menganggap dirinya sebagai penguasa administratif, dan tetap berpendapat bahwa persoalan Timor Portugis harus diselesaikan melalui sebuah referendum yang melibatkan semua partai politik. (Hill, 2000, 71.)

Dalam pelaksanaannya, pemerintah bekerjasama dengan partai-partai politik Timor Leste. Kegiatan penting lain adalah pembentukan komisi dekolonisasi, yang terdiri dari komite-komite untuk bidang pendidikan, pemerintahan, perekonomian, kesehatan masyarakat, dan kesejahteraan. Komite ini dijalankan oleh wakil-wakil pemerintahan dan partai-partai politik.

Diantara partai-partai politik, Partai Fretilin adalah partai politik yang paling aktif dalam komisi dekolonisasi. Mereka juga yang paling siap karena sebelum pembentukan komisi dekolonisasi pada bulan Februari 1975, mereka telah memiliki kebijakan politik yang jelas mengenai berbagai bidang yang mereka rumuskan dalam Manual e Programa Politicos (pedoman dan Program Politik). Program-program Fretilin mendapat dukungan luas dari rakyat Timor Leste. Dalam waktu singkat itu dibuktikan Fretilin mengalahkan popularitas UDT, yang saat itu mendapat dukungan dari pejabat-pejabat pemerintahan, penguasa

tradisional, dan pemilik-pemilik tanah/perkebunan-perkebunan besar. (Hill, 2000: 74)

Frente Revolucionaria do Timor Leste Independente (FRETILIN) untuk pembebasan yang sejati, rakyat harus mengubah, mentransformasi, merevolusionerkan seluruh struktur yang telah berlangsung selama lima ratus tahun kolonialisme di Timor. Tanpa melakukan perombakan besar-besaran dengan menciptakan struktur-struktur baru untuk melayani Rakyat Timor, walaupun kita mendapatkan kemerdekaan tanah air, rakyat Timor tidak mendapatkan kemerdekaan sejati.

Perjuangan untuk kemerdekaan, terdiri dari dua unsur, yaitu perjuangan melawan kolonialisme dan pencegahan terhadap neo-kolonialisme. Perjuangan melawan kolonialisme itu sendiri mengandung dua aspek:

Mengganti kekuasaan politik asing (Portugis) dengan yang lain dikuasai oleh rakyat Timor, dengan mengubah struktur-struktur politik administratif yang ada; mengubah, mentransformasi, merevolusionerkan struktur-struktur sosial-ekonomi jenis yang berlangsung di Timor.

Suatu keadaan neo-kolonial di Timor akan terjadi kalau rakyat Timor Leste tidak bebas untuk menentukan nasibnya sendiri, sekalipun Timor Leste sudah menjadi negara merdeka. Hal ini terutama terjadi melalui masuknya dan penggunaan modal asing yang tidak melayani kepentingan rakyat dan menciptakan jenis lain ketidakmerdekaan: ketergantungan ekonomi.

Partai Fretilin menolak keras prinsip otonomi luas dalam lingkungan federasi Portugal yang dicita-citakan UDT. Selain itu juga menentang keras terhadap ide yang diemban oleh Apodeti yang hendak mengintegrasikan Timor Leste dengan Republik Indonesia. Terhadap Indonesia, Partai Fretilin menilai sebagai negara tetangga paling dekat dan mempunyai kedudukan penting di kawasan Asia Tenggara. Bahasa Indonesia juga dianggap penting, hingga Partai Fretilin menganggap perlu untuk mengajarkan bahasa Indonesia di sekolah-sekolah di Timor Leste bahwa bahasa Indonesia di Timor Leste banyak yang menggunakannya selain bahasa Portugis maupun bahasa Tetum. Karena itu bahasa Portugis dijadikan sebagai bahasa resmi, sedangkan bahasa tetum yang diakui sebagai bahasa yang banyak dimengerti dan dipakai rakyat Timor Leste dinilai tidak lengkap dan tidak dapat dipakai sebagai bahasa resmi. (Durant, 2009: 120)

2.2. Masa Setelah Lepas dari Negara Republik Indonesia



Gambar 3. Presiden Republik Timor Leste I Kay Rala Xanana Gusmão dan Perdana Menteri Dr. Mari Alkatiri

Setelah rezim Orde Baru jatuh, tahun 1999, Presiden Republik Indonesia Bacharuddin Jusuf Habibie memutuskan untuk mengadakan referendum. Referendum dilaksanakan pada tanggal 30 Agustus 1999 berada dibawah berada di bawah tanggung jawab UNAMET (*United Nations Mission in East Timor*). Referendum yang Hasilnya 78, 3% memilih merdeka, 21, 7% memilih tetap bersatu dengan otonomi luas dibawah Negara Kesatuan Indonesia.

Pada tanggal 25 Oktober 1999 Dewan Keamanan PBB mengaitkan UNAMET dengan UNTAET (*United Nations Transitional Administrative in East Timor*) yang diketuai oleh Sérgio Vieira de Mello yang bertugas untuk mempersiapkan pemilihan Dewan Konstitusi (Asembleia Konstituante) yang akan dilaksanakan pada tanggal 30 Agustus 2001 (Duran,2009:145). Pada tanggal 16 Maret 2001 UNTAET mengeluarkan regulasi Nomor 2/2001 yang salah satu poin tentang pendaftaran partai politik (Dopo,dkk,2009:.27) Dengan demikian maka partai Politik Fretilin, mendaftarkan diri dan sebagai salah satu partai politik yang ada di negara Timor Leste dan Pertama kali mengikuti Pemilihan pada 30 Agustus 2001, Partai Fretilin mendapatkan suara mayoritas dalam Majelis Konstituante (*Asembleia*) yang kemudian dialihkan menjadi Parlemen Nasional yang pertama di Negara Timor Leste.

Tanggal 20 Mei 2002, Timor Leste resmi diakui kemerdekaannya secara internasional. Timor Leste menjadi sebuah negara dengan Nama "Republik Demokratik Timor Leste". Kay Rala Xanana Gusmão menjadi presiden pertama

dan Mari Bin Amude Alkatiri menjadi perdana menteri pertama negara itu setelah melepaskan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2.3. Program Partai Fretilin dalam Pemilihan Periode 2017–2022

1. Dalam bidang Pendidikan
 - a) Menghargai professional tenaga pendidik
 - b) Mendirikan sekolah dan meningkatkan kualitas pendidikan
 - c) Memberikan bantuan kepada sekolah–sekolah swasta.
 - d) Memberikan insentif kepada intusi-institusi lain yang mempunyai program–program yang baik tentang anak–anak sekolah.
 - e) Memperbaiki sekolah–sekolah dengan memperhatikan kebersihan kesehatan dan tambahan makanan kepada siswa–siswi.
2. Dalam bidang kesehatan
 - a) Mendukung Vaksin nasional yang telah dilakukan oleh kementerian kesehatan
 - b) Memperkuat ikatan kesehatan yang telah didirikan
 - c) Gerakan Kerakyatan.
3. Persatuan dalam masyarakat.
 - a) Memberikan bantuan kepada pengusaha
 - b) Memberikan kehidupan yang baik kepada masyarakat
4. Dalam bidang pertanian dan Perikanan
 - a) Memberikan dukungan kepada petani dan perikanan
 - b) Belajar dan membangun produksi baru baik mendukung secara material dan sumberdaya manusia

- c) Memberikan dukungan kepada ikatan lingkungan hidup dan memberikan dukungan kepada para pemadam kebakaran
 - d) Menambah kapal-kapal yang ada di Negara Timor Leste.
 - e) Meningkatkan kualitas di sector Perikanan
5. Dalam bidang Hukum dan Keadilan
- a) Dengan cepat dan kerja dengan pengadilan untuk kantor pegawai negeri
 - b) Mendekatkan diri kepada Masyarakat
6. Dalam bidang Ekonomi dan Ketrampilan
- a) Memberikan Pelatihan kepada pengusaha
 - b) Manajemen yang terbuka
 - c) Menggunakan sumberdaya manusia yang berkualitas
 - d) Memberikan suntikan dana kepada pengusaha
7. Dalam bidang Infrastruktur
- a) Mendirikan pusat pengambilan wewenang dalam politik pembangunan yang jujur dan terbuka.
 - b) Mendengar dari Masyarakat dan mengadakan dialog untuk pembangunan fisik yang dilakukan dari pengusaha local.
8. Program untuk veteran
- a) Memberikan kehidupan yang baik kepada para veteran
 - b) Memberikan penghargaan para korban perang baik perempuan maupun laki-laki
9. Mempromosikan Disabilitas
- a) Mendirikan sekolah untuk para Tuna Netra

b) Memberikan Jaminan kepada Tuna Netra

10. Dalam bidang Mempromosikan kesetaraan

a) Mendirikan suatu metode yang baik agar para kaum perempuan mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik khususnya para kaum ibu-ibu dan anak- anak.

b) Mendirikan suatu sistem informasi kesehatan khususnya kesehatan ibu dan anak-anak.

11. Dalam bidang Kepemudaan

Mempromosikan kegiatan kebudayaan dan olahraga dari generasi ke generasi (program kampanye politik 2017)

2.4. Pemilihan Parlemen Nasional Periode 2017–2022

2.4.1. Partai politik dalam pemilihan Nasional periode 2017-2022

Partai Politik yang mengikuti Pemilihan Parlemen Nasional pada periode 2017 - 2022 yang dilaksanakan pada tanggal 22 Juli 2017 di Negara Timor Leste diikuti oleh 21 partai politik sebagai berikut :

Partai politik yang mengikuti pemilihan dan perolehan suara Partai Politik dan koalisi Partai.

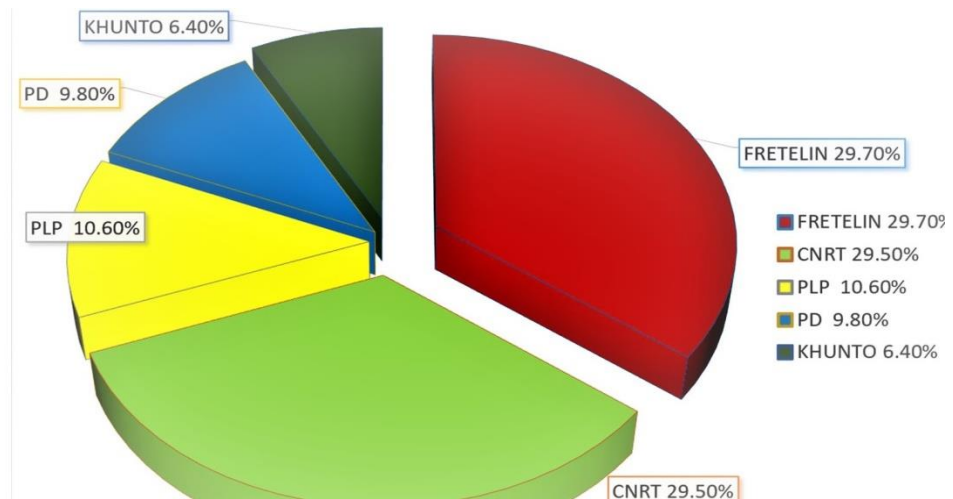
Tabel 2.1. Partai politik

Partai politik dan koalisi Partai		Perolehan suara	%
1.	Bloku Unidade Popular (BUP)	4. 999	0, 9%

2.	Partido Associação Popular Monarquia Timorese (APMT)	5.461	1,0 %
3.	Partidu Kmanek Haburas Unidade Nasional Timor Oan (KHUNTO)	36.547	6,4%
4.	Partido Esperança da Pátria (PEP)	6.775	1,2%
5.	Partido Socialista de Timor (PST)	4.891	0,9%
6.	Partido Desenvolvimento Popular (PDP)	2.079	0,4%
7.	Partido Congresso Nacional de Reconstrução de Timor-Leste (CNRT)	167.345	29,5%
8.	Partido Republicano (PR)	3.951	0,7%
9.	Partido União Democrática Timorese (UDT)	11.255	2,0%
10.	Partido Democrática Cristã (PDC)	1-764	0,3%
11	Partido Movimento Libertação do Povo Maubere (MLPM)	1.332	0,2%
12	Partido Libertação Popular (PLP)	60.098	10,6%
13	Partido Democrático (PD)	55.608	9,8%
14	Partido Unidade Nacional Democrática da Resistência Timorese (UNDERTIM)	1,216	0,2%
15	Partidu Unidade Desenvolvementu Demokratiku (PUDD)	15.887	2,8%
16	Partido Timorese Democrático (PTD)	669	0,1%
17	Partido Frente Mudança (FM)	8.849	1,6%
18	Partido Social Democrata (PSD)	4.688	0,8%
19	Partido Centro Ação Social Democrata Timorese (CASDT)	2.330	0,4%
20	Partido Desenvolvimento Nacional (PDN)	3.846	0,7%
21	Partido Frente Revolucionaria do Timor-Leste Independente (FRETILIN)	168.480	29,7%

2.4.2. Partai politik dan koalisi Partai di kursi di Parlemen Nasional periode

2017-2022



1. Partai FRETILIN : 29,7% dan 23 kursi di Parlemen Nasional
2. Partai CNRT : 29,50% dan 22 kursi di Parlemen Nasional
3. Partai PLP : 10,60% dan 8 kursi di Parlemen Nasional
4. Partai Demokrat : 9,80 % dan 7 kursi di Parlemen Nasional
5. KHUNTO : 6,40 % dan 5 kursi di Parlemen Nasional